

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara, ditemukan tiga persoalan utama yang menghambat penyebaran informasi kearsipan melalui akun tersebut, yaitu dari sisi perencanaan, sumber daya manusia, dan operasional. Dari sisi perencanaan, pengelola akun belum memiliki jadwal unggah maupun kalender konten yang sistematis sehingga konten sering menumpuk dan diunggah bersamaan akibat tekanan kegiatan internal, sementara dari sisi sumber daya manusia, belum tersedia pelatihan khusus mengenai penyebaran informasi kearsipan di Instagram maupun standar kompetensi yang jelas bagi pengelola konten. Dari sisi operasional, belum ada SOP tetap dalam pemilihan arsip yang akan diunggah, ditambah keterbatasan alat digitalisasi yang membuat hanya sebagian kecil arsip statis dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut Teori Informasi Organisasi Weick (1969), ketiga persoalan tersebut pada dasarnya adalah persoalan lemahnya mekanisme retensi organisasi, yaitu belum tersedianya struktur, dokumen, maupun rutinitas baku yang dapat menyimpan dan mewariskan hasil pemaknaan (*enactment-selection*) dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga organisasi masih sangat bergantung pada pengetahuan tasit individu pengelola akun.

Berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta konsep penyebaran informasi), proses penyebaran informasi arsip statis melalui Instagram di Dinarpus Kota Semarang berlangsung melalui empat tahap berurutan, yaitu pengolahan dan pemilihan arsip, autentikasi digital melalui sistem SELARAS, pengemasan konten ke dalam format visual, serta distribusi melalui fitur *feed*, *story*, *reels*, dan *highlight*. Sistem autentikasi berbasis watermark turut memastikan keaslian dan akuntabilitas informasi yang disebarkan kepada publik.

Keempat tahap tersebut secara empiris memvalidasi kerangka Teori Informasi Organisasi Weick (1969) sebagai teori utama penelitian ini, di mana pengolahan dan pemilihan arsip berperan sebagai *enactment* dan *selection* atas data arsip yang bersifat ambigu, autentifikasi melalui SELARAS berperan sebagai *retention* atas makna yang

telah disahkan, dan distribusi melalui fitur Instagram beserta respons audiens yang menyertainya membentuk siklus *double interact* yang berkelanjutan antara Dinarpus Kota Semarang dan masyarakat penggunaanya.

Dari sisi jenis konten, informasi kearsipan yang disebarakan mencakup konten edukatif seperti tutorial restorasi dan pengelolaan arsip, konten layanan seputar prosedur peminjaman arsip, serta konten arsip statis berupa foto lama yang disertai narasi sejarah. Foto dipilih sebagai format utama karena dinilai lebih efisien dibandingkan video, sementara penggabungan tema yang saling berkaitan dalam satu unggahan menjadi strategi untuk menarik keterlibatan emosional audiens.

Dari sisi respons audiens, ditemukan pola yang berbeda antar generasi, kelompok milenial cenderung merespons dengan nostalgia, sedangkan Gen Z lebih tertarik pada nilai edukatif dari sejarah yang belum mereka ketahui, dan generasi baby boomer turut terjangkau melalui keterhubungan otomatis Instagram dengan Facebook lembaga. Pola ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang dikelola dengan baik mampu menjangkau dan bermakna bagi berbagai golongan sasaran, sejalan dengan tujuan penyebaran informasi menurut Anjali & Istiqomah (2021), meski keragaman respons ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola opini publik.

5.2 Saran

1. Saran bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Berdasarkan tiga kendala struktural yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu perencanaan, sumber daya manusia, dan operasional, Dinarpus Kota Semarang disarankan untuk menyusun kalender konten bulanan yang memuat jadwal unggah tetap, sehingga publikasi informasi kearsipan tidak lagi menumpuk akibat tekanan kegiatan internal. Dinarpus juga perlu mengadakan pelatihan teknis bagi tim pengelola akun, khususnya terkait fotografi arsip, penulisan naskah publikasi, dan penanganan komentar negatif, mengingat belum adanya standar kompetensi baku bagi pengelola konten saat ini. Selain itu, penyusunan SOP tertulis dalam seleksi arsip yang layak dipublikasikan perlu segera

dilakukan agar proses kerja tidak lagi bergantung pada penilaian situasional pengelola dan dapat diwariskan kepada pengelola berikutnya. Dalam kerangka Weick (1969), keempat langkah ini pada dasarnya adalah upaya memperkuat tahap retention organisasi, yaitu mengubah pengetahuan dan kebiasaan kerja yang selama ini bersifat tasit dan personal menjadi rutinitas, dokumen, dan standar yang dapat diwariskan lintas personel, sehingga siklus *enactment-selection-retention- double interact* dapat berjalan lebih stabil meskipun terjadi pergantian pengelola akun.

2. Saran Kebijakan dan Implementasi

Keterbatasan alat digitalisasi yang hanya mampu memindai arsip berukuran F4 menjadi hambatan nyata dalam mempublikasikan arsip berukuran besar seperti peta dan kartografi. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran daerah untuk pengadaan alat pemindai berkapasitas lebih besar, sekaligus penyesuaian program digitalisasi Dinarpus dengan target digitalisasi arsip pemerintah daerah yang telah dicanangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Dukungan kebijakan ini penting agar upaya penyebaran informasi kearsipan melalui media sosial tidak lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknis.

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat deskriptif kualitatif dan belum mengukur efektivitas penyebaran informasi kearsipan secara terukur, misalnya perubahan pemahaman atau sikap masyarakat terhadap arsip. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, misalnya melalui survei kepada pengikut akun Instagram Dinarpus, untuk mengukur efektivitas tersebut secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kerangka analisis untuk mengukur jangkauan lintas generasi dari konten kearsipan di media sosial, mengingat kajian semacam ini pada media sosial pemerintah daerah di Indonesia masih terbatas, serta menjadikan temuan soal pengelolaan komentar negatif sebagai dasar pengembangan konsep manajemen reputasi bagi lembaga kearsipan di platform digital. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam pengujian Teori Informasi Organisasi Weick (1969) pada konteks kearsipan pemerintah daerah lain, misalnya dengan mengukur secara

lebih spesifik seberapa besar tingkat equivocality suatu arsip memengaruhi jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk sampai pada tahap retensi dan publikasi, sehingga kontribusi teoretis penelitian ini terhadap kajian komunikasi organisasi di sektor kearsipan dapat lebih terukur dan dapat direplikasi pada lembaga sejenis.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami agar hasil dan kesimpulan yang disampaikan tidak disalahartikan. Keterbatasan pertama berkaitan dengan indikator respons audiens yang digunakan. Dalam penelitian ini, respons audiens hanya diukur melalui data yang tersedia pada fitur Instagram Insights, yaitu jumlah tayangan, likes, komentar, dan share. Batasan ini memang sudah ditetapkan sejak awal dalam ruang lingkup penelitian pada Bab I. Karena penelitian tidak melibatkan wawancara langsung dengan followers atau audiens akun Instagram @dinasarpus_semarang, maka setiap pembahasan mengenai motivasi maupun karakteristik audiens berdasarkan kelompok usia, misalnya kecenderungan nostalgia pada generasi milenial atau minat edukatif pada Gen Z, hanya berasal dari pengamatan pengelola akun selama berinteraksi dengan audiens. Artinya, temuan tersebut belum diverifikasi langsung kepada audiens yang bersangkutan. Dengan kata lain, data ini berfungsi sebagai temuan pendukung yang memperkaya pemahaman secara kualitatif, bukan sebagai bukti empiris yang telah diuji secara langsung.

Keterbatasan kedua terletak pada sifat penelitian yang deskriptif kualitatif. Pendekatan ini tidak dirancang untuk mengukur perubahan perilaku, pemahaman, atau sikap masyarakat terhadap arsip secara kuantitatif. Oleh karena itu, temuan mengenai efektivitas penyebaran informasi kearsipan dalam penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai gambaran deskriptif yang didasarkan pada data selama periode penelitian berlangsung, bukan sebagai pengukuran dampak jangka panjang terhadap audiens. Keterbatasan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam membaca hasil penelitian ini secara proporsional, sekaligus membuka ruang bagi

pengembangan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, sebagaimana telah dijelaskan lebih lanjut pada bagian saran penelitian.

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan penerapan Teori Informasi Organisasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan Teori Weick (1969) sebagai kerangka interpretatif untuk membaca tahapan dan pola komunikasi yang tampak dari luar (data wawancara dan Instagram *Insights*), namun tidak menjangkau proses kognitif atau pengambilan keputusan internal secara mendalam pada level individu pengelola maupun sejawatan mitra kerja. Dengan demikian, konsep *enactment*, *selection*, *retention*, dan *double interact* dalam penelitian ini dipahami sebagai kerangka analisis atas pola perilaku organisasi yang teramati, bukan sebagai hasil pengukuran proses mental internal para pelaku secara langsung